

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA**

TAHUN ANGGARAN 2022



**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Tahun 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Dinas PMPTSPTK khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik. Menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMD, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Benteng, 9 Januari 2023

Kepala Dinas PMPTSPTK



MUHAMMAD ARSYAD, S.Km., M.kes, MSc.PH.

Pangkal Pembina Utama Muda

NIP : 19750101 199903 1 010

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum OPD	1
1.2. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi	2
1.3. Jumlah aparatur sipil negara, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	8
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
2.1.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja kunci Keluaran/Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	8
2.1.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja kunci Hasil/Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)	13
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	15
BAB IV PENUTUP	16

-

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Dinas PMPTSPTK merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja.

1.1. Gambaran Umum Dinas PMPTSPTK

Dinas PMPTSPTK sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : A
- b) Alamat : Jalan Kemiri No. 2 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
- c) Email : dpmptsptk.selayar@gmail.com
- d) Titik koordinat : **S** 6,117966, **E** 120,467171
- e) Foto kantor



1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSPTK mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSPTK yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSPTK dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

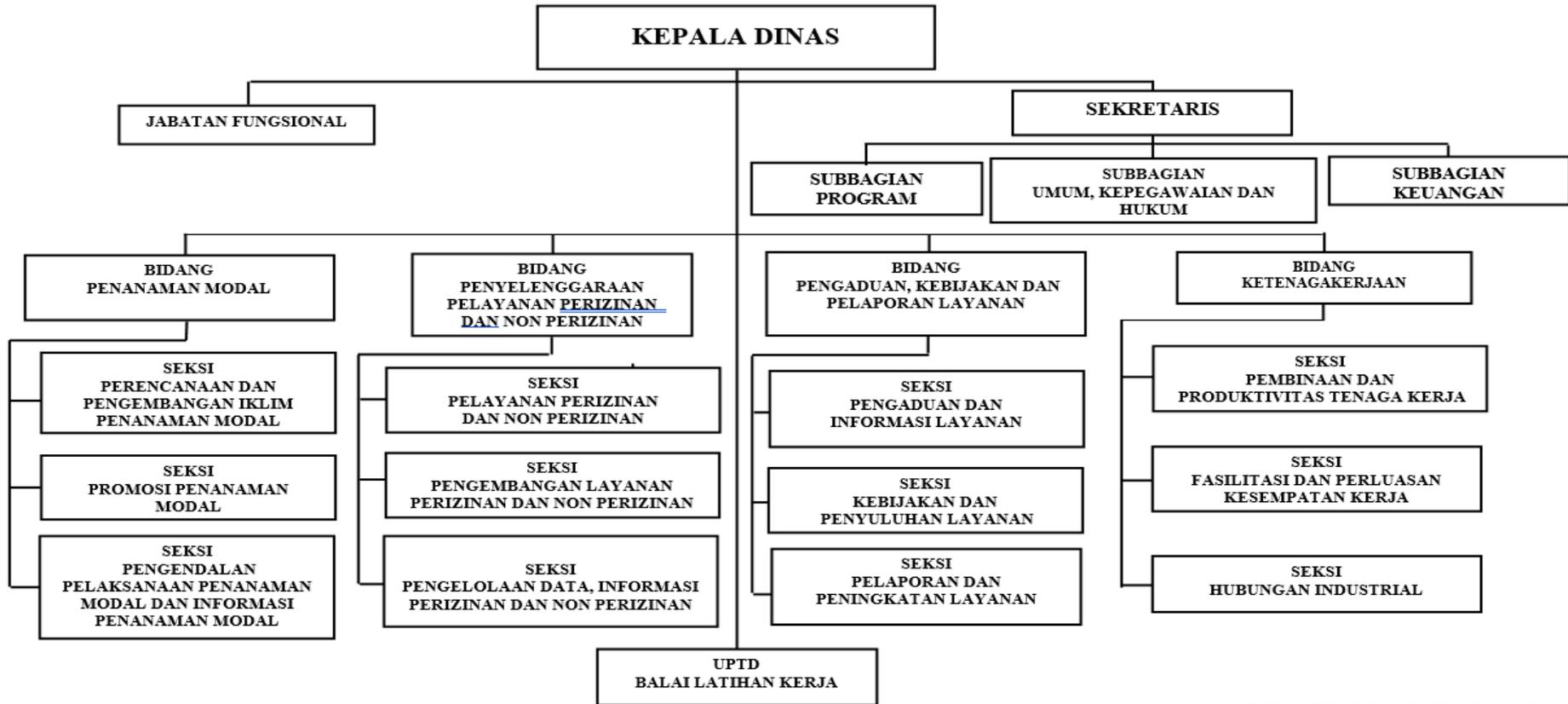
1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
9. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis tenaga kerja;
10. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
12. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
13. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

16. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ikim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terdiri atas;
 - a. Seksi Pelayanan dan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Seksi Pengembangan Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. Seksi Pelaporan Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan terdiri atas;
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
6. Bidang Pelatihan Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas;
 - a. Seksi Pembinaan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Hubungan Industrial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Dinas PMPTSPTK merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2022 sebagai berikut :

- JPTP = 0 orang
- Administrator (Kelas 12) = 1 orang
- Administrator (Kelas 11) = 4 orang
- Pengawas = 16 orang
- Pelaksana = 23 orang
- Fungsional = 2 orang
- Jumlah = 46 orang**

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Dinas PMPTSPTK
Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon
Per Desember 2022

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	3	2	-	5	1	2	1	2	6	-	-
2	Strata Satu (S1)	4	23	-	27	-	3	13	9	25	21	-
3	Diploma	-	3	-	3	-	-	2	2	4	1	-
4	SLTA	1	2	8	11	-	-	0	11	11	17	-
Jumlah		8	30	8	46	1	5	16	24	46	39	-

Sumber data : Subag. Umum, Kepeg. dan Keuangan Dinas PMPTSPTK Kab. Kepulauan Selayar Tahun Desember 2022

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya

saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output (Permendagri 18 Tahun 2021)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1	PENANAMAN MODAL						
		392	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Perda No.8 Tahun 2022	Dis. PMPTSPTK	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Bagi Penanaman Modal
		393	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal		Perbub No. 27 Tahun 2019	Dis. PMPTSPTK	Peraturan daerah No. 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan PM
		394	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun		Dis. PMPTSPTK	Belum ada Investor yang mengajukan permohonan Insentif dan kemudahan
		395	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, <i>one on one meeting</i>	1	Dis. PMPTSPTK	
		396	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1	Dis. PMPTSPTK	
		397	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	5	Dis. PMPTSPTK	
		398	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	1	Dis. PMPTSPTK	
		399	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	izin	2.773 Izin terbit	Dis. PMPTSPTK
		400	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkatKabupaten/Kota		Rp. 12.826.155.311,-	LKPM
		401	Pembinaan aparaturnan penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparaturnan dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal		5 orang	Dis. PMPTSPTK
		402	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanamanmodal		288 Palaku usaha	Dis. PMPTSPTK
		403	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima		12 laporan	Dis. PMPTSPTK

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	TENAGA KERJA						
		244	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	1	1	Dis. PMPTSPTK
		245	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% Realisasi Indikator-Target Indikator x 100% Realisasi	$2.902,75\%/600\% \times 100\% =$	82,87 %	Dis. PMPTSPTK
		246	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0		Dis. PMPTSPTK RTK masih dalam tahap sosialisasi
		247	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2022 ----- x 100% Kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2022	0		Kegiatan ini masih dalam tahap perencanaan
		248	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat tahun 2022 ----- x 100% Jumlah instruktur tahun 2022	6/6X100	100%	Dis. PMPTSPTK
		249	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah Instruktur tahun 2022 ----- x 100% Jumlah peserta pelatihan	$6/350 \times 100\% =$	1,71 %	Dis. PMPTSPTK
		250	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2022 ----- x 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun 2022	0/1 x 100%		Dis. PMPTSPTK BLK Selayar dalam proses menunggu hasil akreditasi
		251	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2022 ----- x 100 % Jumlah LPK yang terdata pada tahun 2022	$1/1 \times 100\% =$	100 %	Dis. PMPTSPTK
		252	Jumlah penganggur yang dilatih			350 orang	Dis. PMPTSPTK

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		253	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2022 ----- x 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2022	350/350 x 100%=	100 %	Dis. PMPTSPTK	
		254	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2022 ----- x 100% Jumlah lulusan pada tahun 2022	74/350x100	21,14%	Dis. PMPTSPTK	
		255	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2022 ----- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat peltihan pada tahun 2022	350/350 x 100%=	100 %	Dis. PMPTSPTK	
		256	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	9/9 x100%	100 %	Dis. PMPTSPTK	
		257	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			9 Pelatihan	Dis. PMPTSPTK	
		258	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n</i> x 100% <i>jumlah perusahaan pada tahun n</i>	$\frac{5}{2.281} \times 100\%$	0,22%	Dis. PMPTSPTK	
		259	Data tingkat produktivitas total				Dis. PMPTSPTK	Data tingkat produktivitas total masih dalam tahap perencanaan
		260	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		$\frac{379}{2.281} \times 100\%$	16,62%	Dis. PMPTSPTK	
		261	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)				Dis. PMPTSPTK	Kegiatan PKB bagi perusahaan masih dalam tahap sosialisasi
		262	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat,				Dis. PMPTSPTK	Belum ada pekerja yang membentuk Serikat Buruh/ Serikat Pekerja

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan					
		263 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.				Dis. PMPTSPTK	Kegiatan Penyusunan struktur skala upah bagi perusahaan masih dalam tahap sosialisasi
		264 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		$\frac{379}{2.281} \times 100\%$	16,62%	Dis. PMPTSPTK	
		265 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		$\frac{1}{2.281} \times 100\%$	0,04 %	Dis. PMPTSPTK	
		266 Jumlah mogok kerja				Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 tidak ada tenaga kerja yang mogok kerja
		267 Jumlah penutupan perusahaan				Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 tidak ada perusahaan yang ditutup berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan
		268 Jumlah perselisihan kepentingan			7 kasus	Dis. PMPTSPTK	
		269 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan				Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 tidak ada perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan karena belum ada SP/SB yang dibentuk
		270 Jumlah perselisihan PHK			7 orang	Dis. PMPTSPTK	
		271 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			7 orang	Dis. PMPTSPTK	
		272 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			7 kasus	Dis. PMPTSPTK	
		273 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan				Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 tidak ada Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan
		274 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Jumlah Perjanjian Bersama ----- x 100%	$\frac{7}{7} \times 100\%$	100 %	Dis. PMPTSPTK	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Perselisihan			
		275	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota			Dis. PMPTSPTK	Tidak ada perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan
		276	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		265 orang	Dis. PMPTSPTK	
		277	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		8 BKK	Dis. PMPTSPTK	
		278	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 tidak ada Tenaga Kerja Khusus mendaftarkan diri
		279	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		3 Orang	Dis. PMPTSPTK	
		280	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 belum ada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal
		281	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.			Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 belum ada perjanjian kerja yang disahkan
		282	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 belum ada penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)
		283	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi			Dis. PMPTSPTK	Pada tahun 2022 belum menyelenggarakan sosialisasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
		284	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		9 orang	Dis. PMPTSPTK	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		285	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulungan				Dis. PMPTSPTK Tahun 2022 tidak ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang meminta fasilitasi kepulungan
		286	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja				Dis. PMPTSPTK Jumlah CPMI Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah dan membutuhkan keterampilan yang beragam, sebagian telah memiliki dokumen yang dibutuhkan oleh tempat kerja tujuan.
		287	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya				Dis. PMPTSPTK Kegiatan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya masih dalam tahap perencanaan
		288	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1	1	Dis. PMPTSPTK	MPP

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcomes (Permendagri 18 Tahun 2021)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penanaman Modal						
		76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{31.424-417.948}{72.474.260.426} \times 100\%$	- 43,36%	LKPM
2	Tenaga Kerja						
		42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$5/11 \times 100\% =$	45,45 %	Laporan kegiatan 2022
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	$350/69.522 \times 100\% =$	0,50%	Dis. PMPTSPTK
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	$\frac{3.765.557.56}{0.000/69.522} \times 100\%$	5.416.120.186,98%	Dis. PMPTSPTK
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	$379/2.281 \times 100\%$	16,6 %	Dis. PMPTSPTK
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	$33/265 \times 100\%$	12,45 %	Dis. PMPTSPTK

BAB III

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN**

**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
Tenaga Kerja tidak melaksanakan**

TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

di Tahun 2022

BAB III
PENUTUP

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab Sebelumnya. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami tidak akan tinggal diam, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keterangan pertanggungjawaban ini.

Benteng, 6 januari 2023

Kepala Dinas PMPTSPTK



MUHAMMAD ARSYAD, S.Km., M.kes, MSc.PH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19750101 199903 1 010

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Jend. Ahmad Yani (MPP) Benteng, 92812, Sulawesi Selatan, Telepon (0414) 21083 Faksimile (0414) 22107

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD, SKM., MKes., MScPH.**
NIP : 19750101 199903 1 010
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Dinas PMPTSPTK belum melaksanakan kegiatan IKK 394 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal dikarenakan Belum ada perusahaan yang bersyarat dan mengajukan permohonan pemberian insentif dan kemudahan Investasi. Berdasarkan arahan **Kementerian Investasi**, dalam menarik investor yang berkualitas disarankan Menyusun proposal IPRO (Investment Project Ready to Offer) dan Menyusun Studi Kelayakan (Feasibility Study) sehingga berdampak pada Perda Insentif dan Kemudahan direvisi kembali.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 6 Januari 2023

KEPALA DINAS



MUHAMMAD ARSYAD, SKM., MKes., MScPH.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19750101 199903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Jend. Ahmad Yani (MPP) Benteng, 92812, Sulawesi Selatan, Telepon (0414) 21083 Faksimile (0414) 22107

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD, SKM., MKes., MSc. PH.**
NIP : 19750101 199903 1 010
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Dinas PMPTSPTK tidak melaksanakan kegiatan berikut ini :

No.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan/ tidak tersedia datanya	Keterangan
2	Urusan Tenaga Kerja	
246	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Kegiatan RTK masih dalam tahap sosialisasi
247	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Kegiatan penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster masih dalam tahap perencanaan
250	Persentase LPK yang terakreditasi	BLK Selayar dalam proses menunggu hasil akreditasi
259	Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total masih dalam tahap perencanaan
261	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Kegiatan PKB bagi perusahaan masih dalam tahap sosialisasi
262	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Belum ada pekerja yang membentuk Serikat Buruh/ Serikat Pekerja



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Jend. Ahmad Yani (MPP) Benteng, 92812, Sulawesi Selatan, Telepon (0414) 21083 Faksimile (0414) 22107

No.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan/ tidak tersedia datanya	Keterangan
263	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	Kegiatan Penyusunan struktur skala upah bagi perusahaan masih dalam tahap sosialisasi
266	Jumlah mogok kerja	Pada tahun 2022 tidak ada tenaga kerja yang mogok kerja
267	Jumlah penutupan perusahaan	Pada tahun 2022 tidak ada perusahaan yang ditutup berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan
269	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Pada tahun 2022 tidak ada perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan karena belum ada SP/SB yang dibentuk
273	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Pada tahun 2022 tidak ada Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan
275	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan
278	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Pada tahun 2022 tidak ada Tenaga Kerja Khusus mendaftarkan diri
280	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Pada tahun 2022 belum ada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal
281	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Pada tahun 2022 belum ada perjanjian kerja yang disahkan
282	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar	Pada tahun 2022 belum ada penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Jend. Ahmad Yani (MPP) Benteng, 92812, Sulawesi Selatan, Telepon (0414) 21083 Faksimile (0414) 22107

No.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan/ tidak tersedia datanya	Keterangan
	Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	(IPK) Online (SISNAKER)
283	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Pada tahun 2022 belum menyelenggarakan sosialisasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
285	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tahun 2022 tidak ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang meminta fasilitasi kepulangan
286	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah CPMI Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah dan membutuhkan keterampilan yang beragam, sebagian telah memiliki dokumen yang dibutuhkan oleh tempat kerja tujuan.
287	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Kegiatan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya masih dalam tahap perencanaan

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 6 Januari 2023

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD ARSYAD, SKM., MKes., MScPH.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19750101 199903 1 010